

## Pengaruh Penerapan Konsep *Value for Money* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Publik di Kota Padang

Josse Andre Warsito<sup>1\*</sup>, Fefri Indra Arza<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

\*Korespondensi: [josseandre07@gmail.com](mailto:josseandre07@gmail.com)

---

**Tanggal Masuk:**

7 Januari 2023

**Tanggal Revisi:**

21 Maret 2023

**Tanggal Diterima:**

13 April 2023

---

**Keywords:** *Concept of Value for Money; Government's Internal Control System; Public Accountability.*

---

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**

Warsito, J.A. & Arza, F.I. (2023). Pengaruh Penerapan Konsep *Value for Money* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Publik di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (2), 666-674.

---

**Abstract**

*This study's goal was to investigate the impact of applying the idea of value for money and the internal control structure of the government to regional organizations' public accountability in the city of Padang. All 43 regional groups in the city of Padang participated in this study. Total sampling was the chosen sampling strategy. The information used is primary information that was obtained from interviews and circulated questionnaires. Analysis is conducted using multiple linear regression. The use of the value for money idea has had a considerable and partially favorable impact on the public accountability of regional organizations in the city of Padang, according to the study's findings. While the government internal control system partially has a negative and insignificant effect on public accountability of regional organizations in the city of Padang.*

---

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.779>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

---

### PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik di Kota Padang dalam bidang pelayanan publik belum lah terbilang baik, dikarenakan masih adanya banyak keluhan masyarakat Kota Padang terhadap pelayanan buruk yang mereka terima. Di tahun 2017, Ombudsman menyoroti pelayanan publik di Kota Padang dsism melayani masyarakat masih kurang optimal serta masih perlu berinovasi dalam mengembangkan pelayanan.

Salah satu OPD yang disorot ialah Disdukcapil Kota Padang yang mana masyarakat mengeluhkan pengurusan yang ribet, tidak adanya kejelasan waktu, berbelit-belit, serta masih adanya calo di Disdukcapil Kota Padang. Sedangkan menurut Permendagri no. 19 tahun 2018, mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik administrasi kependudukan, pasal 3 ayat 2 menyatakan jika “penerbitan dokumen kependudukan diselesaikan dalam waktu 1 jam dan paling lama 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan.” Dengan adanya Maka, tentu saja memberikan penilaian yang buruk terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Akuntabilitas publik sangat penting diterapkan di dalam jalannya pemerintahan, diperkuat dengan diterapkannya konsep *value for money* serta sistem pengendalian internal pemerintah yang baik, maka sistem pemerintahan yang baik akan terwujud. Konsep *value for money* menekankan pada 3 aspek, yakni ekonomis yang meminimalisir keluar nya uang untuk hal tidak penting, efisiensi berkaitan dengan apa yang dikeluarkan dan yang dimasukkan dihubungkan dengan ketetapan standar kinerja yang telah ada, terakhir efektivitas yang berkaitan dengan ketercapaian hasil sesuai ketetapan target awal. Sedangkan dengan diterapkannya sistem pengendalian internal pemerintah yang baik akan membuat masyarakat yakin mengenai keefektifan serta keefisienan setiap kegiatam serta rasa percaya terhadap laporan keuangan, pengamanan aset, serta tidak melanggar aturan undang-undang yang telah ada.

Landasan dari penelitian ini ialah *grand theory stewardship* yang mana tujuan manajemen bukanlah untuk kepentingan sendiri melainkan untuk kepentingan target organisasi. Teori ini diginakan dalam penelitian ini karena output dari organisasi pemerintahan ialah pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan keuangannya terfokus untuk mencapai target seseorang daripada kepentingan individu.

Jadi, tujuan dari penelitian ini ialah mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan diterapkannya konsep *value for money* dan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik serta tegas terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan diterapkannya 2 poin tersebut, diharapkan dapat memperbaiki kualitas akuntabilitas publik Kota Padang terutama dalam hal pelayanan publik.

## **REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **Grand Theory Stewardship**

Teori *stewardship* ialah teori yang mengemukakan jika manajemen seharusnya berfokus pada target yang telah ditentukan serta bukan bertujuan untuk kepentingannya sendiri. Teori ini dikembangkan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Teori ini mengasumsikan ketika suatu organisasi sukses maka memunculkan perasaan lega dan puas. Kerja yang baik dari manajemen serta principals menghasilkan kesuksesan.

Dalam riset ini bisa menerapkan Teori *stewardship* sebab organisasi sektor publik bukan terfokus mementingkan kepentingan secara perorangan melainkan sasaran organisasi yang lebih diutamakan kepentingannya. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat akan diperantarai oleh Akuntansi sektor publik sebagai pemberi informasi bagi kedua belah pihak.

### **Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik bermakna jika hasil suatu substansi dalam bentuk kebermanfaatannya, program, dan aktivitas, juga kebijakan suatu forum publik wajib bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan pada warga sebagai akibatnya warga bisa mengakses informasi tanpa kendala apapun. Pada awal menyusun program pelayanan publik, pembiayaan, pengaplikasian, pemantauan, dan sinkronisasi dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan sudah harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Maka jika warga juga dewan mengawasi dengan baik maka akuntabilitas publik akan tercapai .

Akuntabilitas terdiri dari 4 dimensi, yaitu (1) akuntabilitas kebijakan, berkaitan dengan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah; (2) Akuntabilitas program, berkaitan dengan pertanggungjawaban memakai segala proses yang direncanakan serta dilaksanakan oleh pemerintah; (3) Akuntabilitas proses, berkaitan dengan mekanisme yang diperuntukkan dalam bertugas apakah telah relatif baik

dalam hal mencukupi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, serta mekanisme administrasi; (4) Akuntabilitas hukum dan peradilan, berhubungan dengan setiap penggunaan dana publik wajib didasari atas aturan serta peraturan yang melandasinya.

### **Konsep *Value for Money***

Aspek ekonomi dari konversi input primer, seperti sumber keuangan sementara yang menjadi input sekunder yakni tenaga kerja, material, infrastruktur, dan barang modal yang dipakai dalam kegiatan operasional organisasi, ditekankan dalam *Value for Money*. Efisiensi, proses dimana organisasi dapat menghasilkan output terbaik dengan sumber daya paling sedikit yang tersedia; efisiensi, yang terhubung dengan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Sistem pengendalian internal terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan pemeriksaan keakuratan dan keandalan data akuntansi, serta memperhatikan efisiensi dan dorongan pemenuhan kebijakan manajemen. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), lima indikator berikut disarankan untuk mengukur pengendalian internal: (1) lingkungan pengendalian, (2) memperkirakan risiko, (3) informasi serta komunikasi, (4) tata cara pengadilan, (5) pemeriksaan.

### ***Value for Money* Terhadap Akuntabilitas Publik di Kota Padang**

*Value for money* ialah penilaian kinerja yang mencakup ekonomis, efisiensi, serta efektivitas. Ekonomis ialah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu di harga yang terendah. Efisiensi ialah pemanfaatan input terendah ataupun dalam standar tertentu untuk mencapai hasil optimal. Efektivitas ialah taraf ketercapaian tingkat hasil program sesuai dengan ketetapan awal.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa organisasi sektor publik telah berjalan sebagaimana mestinya, yakni diutamakan bagi khalayak umum menurut *stewardship theory*, karena adanya pengelolaan anggaran dengan konsep *value for money*. Jika sebuah organisasi memakai biaya pengeluaran terendah untuk menghasilkan pemasukan tertinggi untuk memenuhi tujuannya, nilai uang dapat direalisasikan.

**H1:** Konsep *value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik di kota Padang.

### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Publik di Kota Padang**

Visi dan misi pemerintah yang tercapai menunjukkan jika *good governance* tercapai sebagai wujud sistem pengendalian internal yang baik pada lingkungan pemerintah. Pelaporan keuangan suatu instansi pemerintah akan semakin terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat diandalkan jika sistem pengendalian internal yang dimilikinya semakin baik. Karena sistem pengendalian internal yang berhasil memudahkan operasi pemerintah menjadi efisien, efektif, dan akuntabel sambil mengklaim laporan keuangan dan data keuangannya dapat dipercaya.

**H2:** Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik di kota Padang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini ialah eksplanatori, yaitu penelitian yang tujuannya untuk mengungkap korelasi antara variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis penelitian. Pendekatan kuantitatif dipakai pada penelitian. Penelitian ini berlokasi pada seluruh OPD Kota Padang yang berjumlah 43 OPD (sumber: padang.go.id). Sedangkan, waktu yang dipakai untuk penelitian ialah 1 (satu) bulan dimulai sejak 19 Juli-19 Agustus 2022. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh OPD Kota Padang yang berjumlah 43 OPD. *total sampling* dimanfaatkan sebagai metode pengambilan sampel. Responden pada penelitian ini merupakan kepala dinas serta sekretaris dinas dari setiap OPD di Kota Padang.

Ada dua cara yang dipakai dalam mengumpulkan data yakni dengan cara (1) menyebar kuesioner memakai skala likert dengan 5 tingkat penilaian untuk mengukur pendapat serta jawaban responden. Pernyataan ini dikembangkan dengan memakai skala likert yang masing-masing untuk pernyataan diberi skor 1-5 : skor 1 = “Sangat tidak setuju” ( STS ); skor 2 = “Tidak Setuju” ( TS ); skor 3 = “Netral” ( N ); skor 4 = “Setuju” ( S ); skor 5 = “Sangat Setuju” ( SS ) (2) Wawancara dipakai dengan tujuan agar data penelitian yang belum ada dilengkapi dengan memakai instrumennya berupa pertanyaan

### **Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif**

Menyampaikan ilustrasi suatu data yang ditinjau dari mean, standart deviasi, varian, minimum, maximum, range, kurtosis, sum serta skewness (Imam Ghazali, 2016).

### **Uji Instrumen Penelitian**

#### **Uji Validitas Data**

Valid bermakna instrumen bisa dipergunakan untuk mengukur apa yang sepatutnya diukur. Pertanyaan yang diberikan dihitung korelasinya sebagai upaya menguji validitas dengan metode person correlation. Jika person correlation yang dihasilkan punya nilai  $<0,05$  memberi arti jika data yang didapatkan ialah valid.

#### **Uji Reliabilitas**

Rumus *alpha cronbach's*  $>0,6$  dalam spss dipakai menguji reliabilitas pada riset ini. Maka ditemukan hasilnya ialah reliabel. Instrumen yang reliable artinya instrumen tidak akan memberikan hasil berbeda meskipun mengukur objek sama beberapa kali..

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Multikolonieritas**

Tujuan dari uji ini ialah apakah di model regresi berganda ditemui ada hubungan antar variabel bebas. Uji multikolonieritas ini memakai metode tolerance dan VIF. Jika nilai tolerance  $>0,10$  maka tidak terjadi multikolonieritas. Dikatakan tidak terjadi multikolonieritas jika nilai VIF  $<10,00$

##### **Uji Normalitas**

Variabel residual yang bertujuan untuk memahami model regresi memiliki distribusi normal. Nilai residu dianggap mengikuti distribusi normal dalam uji t dan f. Tes statistik salah jika estimasi tidak terpenuhi. Akibatnya, statistik Uji Kolmogorov-Smirnov dipakai untuk menetapkan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Variabel residual yang bertujuan untuk memahami model regresi memiliki distribusi normal. Nilai residu dianggap mengikuti distribusi normal dalam uji t dan f. Tes statistik salah jika estimasi tidak terpenuhi. Maka Uji Kolmogorov-Smirnov dipakai untuk menetapkan apakah data terdistribusi normal atau tidak.

### Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji ini ialah menguji apakah dari riset satu ke riset lainnya model regresi terjadi ketidaksamaan varian serta residual. Bisa dikatakan homokedastisitas jika residual dari riset satu ke riset lainnya permanen. Pengujian dengan metode *glejser* dapat dimanfaatkan guna mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas .

### Uji Hipotesis

#### Uji Statistik f

Kriteria pengujian ini memakai nilai sig 0,05. Model regresi dinyatakan tidak layak dipergunakan atau jelek apabila sig yang didapatkan >0,05 sebaliknya dinyatakan layak dipakai apabila sig yang didapatkan <0,05.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji ini dilaksanakan tujuan utamanya ialah mengukur berapa nilai dari kemampuan model pada mengungkapkan keberagaman variabel dependent dengan nilai kisaran koefisien determinasi 0-1. Bila nilai R<sup>2</sup> mendekati 1, maka kemampuan model dalam mengungkapkan variabel dependent baik.

### Uji Statistik t

Pengujian statistik t dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui efek dari masing-masing variabel independent di variabel dependent. Uji statistik t ini dilaksanakan dengan kriteria jika sig yang diperoleh <0,05 maka hipotesis pada penelitian ini ditolak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1.**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Rata-Rata	Std. Deviation
Konsep <i>Value for Money</i> (X1)	86	47	60	53,13	2,747
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2)	86	39	50	43,90	2,744
Akuntabilitas Publik di Kota Padang (Y)	86	44	55	49,03	3,077
Valid N (listwise)	86				

Variabel X1 memiliki keseluruhan hasil terendah 47, nilai tertinggi 60, mean 53,13 dan standar deviasi 2,747. Maka berarti jika nilai mean > nilai standar deviasi, maka memperlihatkan hal positif. Variabel X2 memiliki keseluruhan hasil terendah 39, nilai tertinggi 50, mean 43,90 dan standar deviasi 2,744. Maka berarti jika nilai mean > nilai standar deviasi, maka kesimpulannya data normal dan tidak bias dalam penyebaran data.

Variabel Y memiliki keseluruhan hasil terendah 44, nilai tertinggi 55, mean 49,03 dan standar deviasi 3,077. Maka berarti jika nilai mean > nilai standar deviasi, maka kesimpulanya data normal dan tidak bias dalam penyebaran data.

**Tabel 2.**  
**Hasil Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	16,585	5,444		3,047	,003
Konsep <i>Value for Money</i> (X1)	,845	,194	,754	4,342	,000
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2)	-2,83	,195	-,252	-1,453	,150
Dependent variable: Akuntabilitas Publik di Kota Padang					

## Pembahasan

### Konsep *Value for Money* Terhadap Akuntabilitas Publik di Kota Padang

Bersumber pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, maka didapatkan jika penerapan konsep *value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik di kota Padang memiliki nilai signifikan  $0,000 < 0,005$  sehingga hipotesis bisa diterima. Selaras dengan riset yang telah dilaksanakan oleh Fiktor A. Mahmud (2013), Julius Saputra (2015), Felmi D. Lantowa (2018), dan Andi Ahmad Yani (2020) yang hasilnya menyatakan *value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Implikasi hasil penelitian ini terhadap akuntabilitas publik di kota Padang ialah dapat memberikan gambaran kepada setiap OPD di Kota Padang jika dengan diterapkannya konsep *value for money* yang baik akan meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran dan ketepatan program yang telah direncanakan maka dengan harapan pemerintah Kota Padang dapat meminimalisir hal-hal yang kurang sesuai, seperti dana yang keluar terlalu banyak ataupun ditemukan penyelewengan dana tentu nya dengan tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

### Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Publik di Kota Padang

Bersumber pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, maka didapatkan jika sistem pengendalian internal pemerintah memiliki nilai signifikan  $0,150 \geq 0,05$  sehingga hipotesis sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik di kota Padang ditolak. Hasil ini berbeda dari riset Rita Martini, Naufal Lianto, Sukmini Hartati, Zulkifli, Endah Widyastuti (2019), Mohammad Agiet Setiawan Rahim (2020), yang mana hasil kedua penelitian ini menunjukkan hasil yang berbanding terbalik.

Implikasi hasil penelitian ini terhadap akuntabilitas publik di Kota Padang ialah memberikan peringatan kepada OPD di Kota Padang serta pihak yang terkait untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada pemerintahan Kota Padang dengan memperhatikan indikator sistem pengendalian internal.

Karena dengan diterapkannya SPIP yang baik dan maksimal dapat mendorong tiap OPD di Kota Padang menjalankan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat merugikan Kota Padang.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Bersumber pemaparan dari pembahasan, maka kesimpulan yang diambil ialah jika penerapan Konsep *Value for Money* (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik (Y) OPD di Kota Padang. Dan sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Publik (Y) OPD di Kota Padang. Dengan Maka maka OPD Kota Padang harus mempertahankan penerapan konsep *value for money* dan meningkatkannya, serta lebih meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang taat dengan peraturan perundang-undangan.

### **Keterbatasan**

Variabel tidak terukur dengan sempurna akibat saat menjawab pertanyaan responden kurang serius dalam menjawab. Jarak waktu pengembalian kuesioner dari responden di OPD Kota Padang yang memakan waktu. Penelitian ini hanya mengambil sampel OPD di Kota Padang, sehingga hasil penelitian hanya berlaku untuk Kota Padang.

### **Saran Untuk Penelitian Selanjutnya**

Variabel Akuntabilitas Publik dapat diuji coba hubungannya dengan variabel lain oleh peneliti selanjutnya dengan memperhatikan sumber-sumber relevan. Metode kualitatif atau wawancara secara langsung bisa dipakai dalam riset selanjutnya. Menambah item baru di dalam kuesioner yang akan disebar pada narasumber.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- “Ombudsman Sorot Pelayanan Publik di Sumbar”.  
<http://news.klikpositif.com/baca/13628/ombudsman-sorot-pelayanan-publik-di-sumbar>.  
diakses pada 01 Mei 2022 pukul 11.06
- “Ombudsman: Pelayanan Publik Di 18 Kelurahan di Padang Bermasalah”.<https://www.infosumbar.net/berita/berita-sumbar/ombudsman-pelayanan-publik-di-18-kelurahan-di-padang-bermasalah/>. Diakses pada 01 Juni 2022 pukul 21.19 WIB.
- “Pengertian Akuntabilitas dalam Akuntansi dan Penerapannya”.  
[https://www.jurnal.id/id/blog/pengertianakuntabilitas/#Jenis\\_Akuntabilitas\\_lalah](https://www.jurnal.id/id/blog/pengertianakuntabilitas/#Jenis_Akuntabilitas_lalah),  
diakses pada 28 Desember 2021 pukul 20.00.
- “Sidak Mal Pelayanan Publik di Padang, Ombudsman: Rapor Layanan Masih Merah”.  
<https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--sidak-mal-pelayanan-publik-di-padang-ombudsman-rapor-layanan-masih-merah>. diakses pada 01 Juni 2022 pukul 21.35 WIB.
- “Value for Money (VFM)”. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/21-18/pjpk/persyaratan-proyek/value-for-money-vmf>, diakses pada 28 Desember 2021 pukul 20.35.
- Agustin, R.D., Subardjo, A. 2017. “Konsep Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik”. Vol.6.

- Ardila Isna, Ayu Anindya Putri. 2015. "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi". Jilid 15. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Arikunto, S. 2006. "Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bastian, Indra. 2010. "Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar". Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Cangemi, Michael P., Tommie, Singleton. 2003. "Managing The Audit Function: A Corporate Audit Departement Procedures Guide. Third Edition. John Willey & Sons. Inc.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. "Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns". Australian Journal of Management. 16 (1), 49-64.
- Dwiyanto, Agus. 2012. "Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia (Jilid 2)". Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Ghozali, Imam. 2016. "Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program (IBM. SPSS). Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia. 2008. "Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern". Jakarta.
- Indonesia. 2018. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan". Jakarta.
- Julius, S. 2015. "Pengaruh Value For Money Ekonomis ,Efisiensi Dan Efektivitas Terhadap Akuntabilitas Publik Stadi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang". Skripsi. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Lantowa D. Felmi. 2018. "Pengaruh Penerapan Dimensi Value For Money Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango)". Skripsi. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Mahmud A. Fiktor. 2013. "Pengaruh Value For Money Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi pada kantor DPPKAD Kabupaten Gorontalo)". Skripsi. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Mahmudi, 2015. "Manajemen Kinerja Sektor Publik". Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mohammad Agiet Setiawan Rahim, 2020. "Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara". Skripsi. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Paulus J. Rahakbuw, Salsabila Firdausy. 2018. "Akuntabilitas: Menuju Indonesia Berkinerja", <http://rbkunwas.menpan.go.id/artikel-rbkunwas/426-akuntabilitas-menuju-indonesia-berkinerja>, diakses pada 28 Desember 2021 pukul 19.34.
- Riadi, Muchlisin. 2020. "Value for Money (Pengertian, Manfaat, Indikator, dan Pengukuran)". <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/value-for-money.html?m=1>, diakses pada 30 Desember 2021 pukul 21.01.
- Rina Martini, Nunik Retno, dan Dwi Purwandari. 2013. "Patologi Birokrasi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang". Jurnal Ilmu Pemerintahan 2 (2). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rita, M., Naufal, L., Sukmini, H., Zulkifli, Z., Endah, W. 2019. sistem pengendalian Internal pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di kecamatan sembawa. Jurnal akademi akuntansi 2019 (Online), Volume 2 No.1. (<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa>), diakses 2 April 2020)



- Setiana dan Yuliani. 2017. “Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Jurnal. Jawa Timur: Universitas Muhammadiyah.
- Sugiyono. 2015. “Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [www.coso.org](http://www.coso.org)
- Yani Ahmad A., 2020. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Konsep Value for Money, dan Sistem Pengendalian Internal Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Digital (di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Selatan)”. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.